

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 2011).
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Dharmasaputra, Metta, *Wajah Baru Industri Migas Indonesia*, (Jakarta: PT Katadata Indonesia, 2014).
- Djamin, Djanius dan Arifin, Syamsul, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, (Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas), 1993).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1970).
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- HS, Salim, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia, Revisi III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Lubiantara, Benny, *Ekonomi Migas*, (Jakarta: Grasindo, 2012).
- Maru, Sophar, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasir, Abdul, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2014).
- Sanusi, Bachrawi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Simamora, Rudi M., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996).
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin, 1999).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Utomo, Sutadi Pudjo, *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contract Indonesia*, (Jakarta: Reforminer Institute, 2010)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerja Sama Kontrak, Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kerja Sama

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

C. Internet

<http://www.ekonomi.kompasiana.com/>

<http://www.skkmigas.go.id/>

<http://www.indomigas.com/>

<http://www.kabarbisnis.com/>

<http://www.kompas.com/>

<http://www.migas.esdm.go.id/>

<http://www.republika.co.id/>

D. Sumber Lain

BP Migas, *Tidak Ada Lagi Wilayah Abu-Abu*, Buletin BP Migas, Edisi No. 45, 2008

Husna, Cut Asmaul, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hal. 600, 2012

Lex Jurnalica, *Konsep Welfare State Dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MK RI)* Vol. 4, No. 2, 2007

Shobah Shofia dan Hanif Nur Widhiyanti, *Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Tukirman, *Pengaruh Perpajakan Terhadap Penerimaan Negara dari Kontrak Production Sharing Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: UI, Disertasi, 1998)